

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia Nya sehingga Laporan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 dapat terselesaikan meskipun masih ada yang kurang sempurna, hal ini untuk melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Rivi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja tersebut merupakan dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2013-2018, Rencana Kerja Tahun (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Untuk mencapai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018 yang tertuang pada Visi Kabupaten Bojonegoro yaitu **“Terwujudnya Pondasi Bojonegoro Sebagai Lumbung Pangan dan Negeri Yang Berdaya Saing, Adil, Sejahtera, Bahagia dan Berkelanjutan”** Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka percepatan pencapaian sasaran rencana strategi Kabupaten Bojonegoro mempunyai Visi yaitu : **“ Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Daerah Secara Profesional, Transparan, Inovatif dan Akuntabel Menuju Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa “**

Berdasar visi dan misi yang tertuang dalam RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro, maka laporan kinerja yang dicapai adalah sebagai berikut :

Misi ke 1 (satu) : Melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, cepat, tepat dan akurat sesuai peraturan yang berlaku :

Tujuan 1 : Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah mulai dari perencanaan, penatausahaan dan pertanggung-jawaban yang dijabarkan dalam 2 sasaran dan 6 indikator dengan capaian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kekayaan daerah diukur melalui indikator tersedianya informasi keuangan daerah berhasil;

- Sasaran 1 terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan daerah diukur melalui indikator optimalisasi LKPD berhasil;
- Sasaran 1 terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan daerah diukur melalui indikator peraturan peningkatan jumlah pengelola keuangan SKPD berhasil;
- Sasaran 2 terwujudnya tertib pengelolaan Keuangan daerah diukur melalui indikator peningkatan OPD yang mengirimkan laporan keuangan tepat waktu berhasil;
- Sasaran 2 terwujudnya tertib pengelolaan Keuangan daerah diukur melalui indikator peningkatan OPD yang menyusun LKPD tepat waktu berhasil;
- Sasaran 2 terwujudnya tertib pengelolaan Keuangan daerah diukur melalui indikator peningkatan jumlah SKPD yang tertib administrasi aset berhasil.

Misi ke 2 (dua) : Meningkatkan pelayanan administrasi pengelolaan Keuangan Daerah secara optimal

Tujuan 1 : Berkembangnya sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi yang dijabarkan dalam 1 sasaran dan 1 indikator dg capaian sebagai berikut :

- Sasaran berkembangnya sistem keuangan Daerah yang efektif dan efisien diukur melalui indikator peningkatan jenis laporan yang disajikan berhasil

Demikian laporan ini kita buat dan diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi, baik dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan maupun dalam perjanjian kinerja demi terwujudnya Tata Kelola Keuangan Daerah secara profesional, transparan, inovatif dan akuntabilitas menuju Pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Bojonegoro, Desember 2017

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**

**M. IBNU SOEYOETI, SE.Msi
Pembina Utama Muda
NIP. 19641117 199301 1 003**

